



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU**

JALAN GARUDA NO. 22 PALU 94116
TELEPON (0451) 482131, FAKSIMILE (0451) 482131
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.palu@kkp.go.id

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,
di Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor B.118/SPPMHKP.PALU/TU.140/IV/2026

No.	Jenis Sampel yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Palu	Satu Laporan	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima
.....,

(.....)

Palu, 17 April 2026
Pegirim
Kepala Stasiun PPMHKP Palu,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hamzah



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026

BADAN PENGENDALIA DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKIPM PALU

Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu (LKj SPPMHKP Palu) Triwulan I tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SPPMHKP PALU dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

LKj Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Palu diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Palu adalah Target kinerja dari Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun PPMHKP Tahun 2026.

Kami berharap laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun PPMHKP Palu dimasa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Palu, 17 April 2026

Kepala



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

HAMZAH, S.PI.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 ARAH KEBIJAKAN	5
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 RENCANA STRATEGIS	7
2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	8
2.3 ANGGARAN	10
2.4 PENGUKURAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 CAPAIAN KINERJA	12
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	14
3.3 REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV PENUTUP	32

Tabel 1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP PALU Tahun 2026	9
Tabel 2	Alokasi Pagu Stasiun PPMHKP Palu	10
Tabel 3	Capaian Kinerja SPPMHKP PALU Triwulan I Tahun 2026	13
Tabel 4	Target dan Realisasi IK.1.01 Pada Triwulan I Tahun 2026	15
Tabel 5	Target dan Realisasi IK.1.02 Pada Triwulan I Tahun 2026	17
Tabel 6	Target dan Realisasi IK.2.01 Pada Triwulan I Tahun 2026	19
Tabel 7	Target dan Realisasi IK.3.01 Pada Triwulan I Tahun 2026	24
Tabel 8	Target dan Realisasi IK.3.02 Pada Triwulan I Tahun 2026	24
Tabel 9	Target dan Realisasi IK.3.03 Pada Triwulan I Tahun 2026	25
Tabel 10	Target dan Realisasi IK.3.04 Pada Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 11	Target dan Realisasi IK.3.05 Pada Triwulan I Tahun 2026	27
Tabel 12	Target dan Realisasi IK.3.06 Pada Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 13	Target dan Realisasi IK.3.07 Pada Triwulan I Tahun 2026	29
Tabel 14	Target dan Realisasi IK 3.08 Pada Triwulan I Tahun 2026	30
Tabel 15	Penyerapan Anggaran per kegiatan Triwulan I Tahun 2026	31
Tabel 16	Penyerapan Anggaran per kegiatan Triwulan I Tahun 2026	31

Gambar 1.	Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP PALU	3
Gambar 2.	Peta Strategis, Sasaran dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026	8
Gambar 3.	Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjaku	12

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK SPPMHKP Palu pada Triwulan I Tahun 2026 adalah Sebesar **110,23 %**. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SPPMHKP Palu yang telah ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu sampai pada saat TW I. capaiannya adalah 73 atau 101,39% dengan target triwulan I yaitu 72.
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu capaiannya adalah 69,86 atau 97,03% dengan target triwulan I yaitu 72.
3. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu capaiannya adalah 81,37 atau 114,61% dengan target triwulan I yaitu 71.
4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palu, Tidak ada target dan realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2026
5. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palu, Tidak ada target dan realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2026
6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu, Tidak ada target dan realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2026
7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palu, capaiannya adalah 100 atau 116,28% dengan target triwulan I yaitu 86 (Persen)
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu, Tidak ada target dan realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2026
9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu, Tidak ada target dan realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2026
10. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu, capaiannya adalah 100 atau 120% dengan target triwulan I yaitu 77.

11. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palu, capaiannya adalah 4,0 (Indeks) atau 114,29% dengan target triwulan I yaitu 3.50 (Indeks)

Kinerja keuangan Stasiun PPMHKP Palu Triwulan I Tahun 2026 mencapai **Rp. 781.991.019.** atau **23.90%** dari pagu anggaran DIPA sebesar **Rp. 3.272.524.000.** terdapat blokir anggaran sebesar **Rp. 82.324.000** atau 2,52% sehingga total realisasi **23.90%** Pagu anggaran Stasiun PPMHKP Palu tersebut dilaksanakan melalui program Nilai tambah dan daya saing industri dan program dukungan manajemen, kegiatan meliputi: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Manajemen Mutu

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggara *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Setelah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan susunan organisasi dan perubahan nomenklatur dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas memberikan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Oleh karena itu sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawahnya Stasiun KIPM Palu dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Stasiun PPMHKP Palu. Disamping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang Tata Usaha, Pasca Panen, Produksi Primer, Manajemen Mutu dan Jabatan Fungsional serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Palu. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Palu Triwulan I Tahun 2026 merupakan instrument bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat di capai melalui implementasi program dan kegiatan yang bersinergi. Program dan kegiatan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran strategis tersebut yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 tahun (2025-2029).

Laporan Kinerja ini di susun dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT 2026 dan RKA-KL 2026 serta yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026 sehingga diketahui sejauh mana Tingkat capaian kinerja Stasiun PPMHKP Palu selama 2026.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

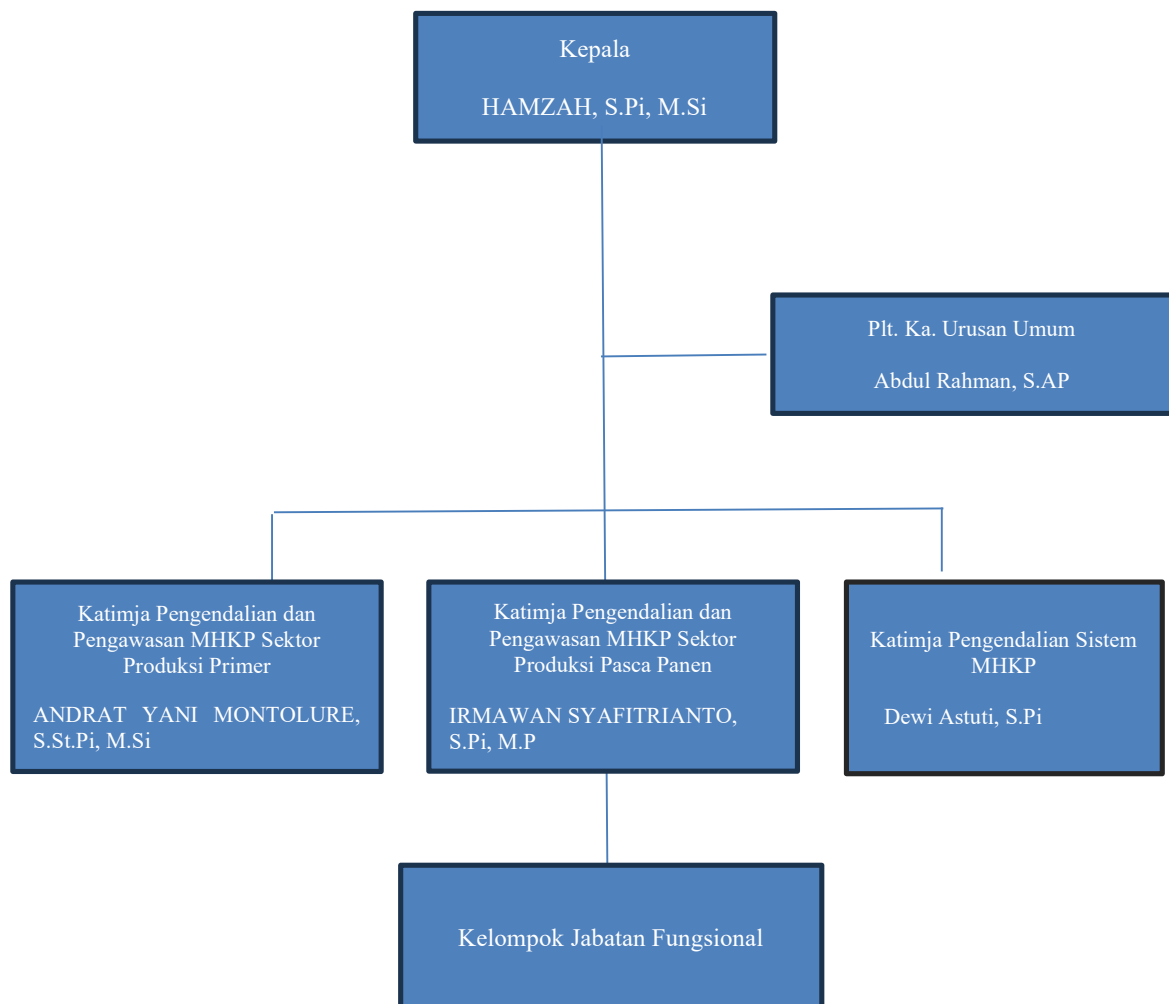
Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Stasiun PPMHKP Palu dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan unsur pelaksana Badan Pengendalian Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di daerah dengan dibantu oleh 1 (satu) eselon V yaitu Plt Ka.Urusan Umum, 3 (Tiga) Ketua Tim Kerja dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi (Gambar 1) sebagai berikut:

1. Kepala
2. Plt. Kepala Urusan Umum
3. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer
4. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen
5. Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi SPPMHKP PALU

Adapun tugas dan fungsi jajaran dibawah kepala kantor adalah sebagai berikut:

1. Kepala Urusan Umum Mempunyai Tugas melaksanakan urusan Urusan Tata Usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Urusan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
2. Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai Tugas melakukan pengujian terhadap mutu, kualitas dan keamanan hasil perikanan.
3. Ketua Tim Kerja Pengendalian (Timja Pasca Panen), dan Pengawasan (Timja Produksi Primer) Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan di unit pembudidaya ikan, unit pembenihan, supplier dan unit pengolahan ikan dan melaksanakan monitoring kesegaran ikan di wilayah perairan/wilayah penangkapan ikan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional .

Jumlah SDM yang mendukung kinerja Stasiun PPMHKP Palu selama Triwulan I Tahun 2026 berjumlah 13 orang pegawai dan P3K dengan komposisi pejabat struktural sebanyak 1 orang, fungsional Mutu/APBN sebanyak 3 orang, dan fungsional Umum sebanyak 5 orang serta dibantu oleh P3K sebanyak 4 orang, P3k PW 2 Orang dan pegawai PJLP sebanyak 4 orang.

1.4 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam konteks pasar global, peran BPPMHKP difokuskan pada Upaya meruntuhkan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) yang sering dihadapi produk Indonesia. Pasar internasional kini tidak hanya menuntut produk yang murah, tetapi juga produk yang aman, legal, dan berkelanjutan. Melalui Renstra ini, BPPMHKP memperkuat sistem jaminan mutu yang mengharmonisasikan standar nasional dengan regulasi negara tujuan ekspor.

Sementara untuk pasar domestik, peran BPPMHKP diarahkan pada perlindungan konsumen dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Renstra 2025-2029 menekankan pentingnya ketersediaan ikan yang tidak hanya melimpah, tetapi juga bermutu tinggi dan bebas dari kontaminan berbahaya. Hal ini berkorelasi langsung dengan upaya nasional dalam perbaikan gizi masyarakat dan penurunan angka stunting. Dengan mengawasi mutu produk yang beredar di pasar tradisional hingga ritel modern, BPPMHKP menjamin bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan asupan protein terbaik, yang pada gilirannya menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu (budidaya dan penangkapan), BPPMHKP memastikan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) yang memadai. Di sektor hilir (pengolahan dan distribusi), fokus diarahkan pada higiene industri, rantai dingin (cold chain), logistik yang higienis, penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sistem ketertelusuran (traceability) produk yang terpercaya. Dengan demikian dapat meminimalkan risiko penolakan (rejection) di luar negeri, dan secara langsung meningkatkan citra serta daya saing Indonesia di rantai pasok global.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini menyampaikan Tingkat pencapaian kinerja Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026. Tingkat keberhasilan capaian kinerja tersebut diketahui dengan cara membandingkan target kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan I tahun 2026.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Palu mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- BAB I. **Pendahuluan**, menjelaskan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.
- BAB II. **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran strategis.
- BAB III. **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja strategis.
- BAB IV. **Penutup**, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Indonesia memasuki periode pembangunan 2025–2029 dengan visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Sektor kelautan dan perikanan ditempatkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, terutama melalui hilirisasi, peningkatan nilai tambah, swasembada pangan, dan penguatan ekonomi biru.

Dalam konteks tersebut, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan elemen fundamental keberhasilan hilirisasi dan perdagangan global. Tanpa sistem mutu yang kuat, hilirisasi berisiko gagal, produk tidak diterima pasar internasional, dan kerugian ekonomi meningkat.

BPPMHKP sebagai institusi yang mengampu fungsi pengendalian dan pengawasan mutu dari hulu ke hilir, sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik, Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik, Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik, Cara Penanganan Ikan yang Baik, sertifikasi HACCP, traceability, layanan laboratorium, dan registrasi ekspor, menjadi pilar utama dalam memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor kelautan dan perikanan.

Mulai tahun 2024, terjadi perluasan mandat melalui peralihan sertifikasi subsektor budidaya dan tangkap ke Badan Mutu. Kondisi ini memperluas cakupan kerja dan menuntut penguatan kelembagaan, SDM, dan sistem pengawasan. Renstra ini disusun untuk memastikan program BPPMHKP selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan Renstra KKP 2025–2029, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara

berskesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 dibawah ini



Gambar. 2. Peta Strategi, Sasaran dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				2026	TW.I
Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	72	72
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	72	72
Kegiatan 2. Pengendalian sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar					
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar.	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	71	71
Kegiatan 3. Dukungan Manajerial Internal Lingkup BPPMHKP					
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Palu	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Indeks)	82,5	-
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	77	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	86,2	-
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Persen)	86	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	92,1	-
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	71,75	-
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	77	77
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Indeks)	3,5	3.5

2.3 ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Palu Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA - 032.13.2.649601/2026 pagu awal sebesar Rp. 3.655.621. dan pagu akhir sebesar Rp. 3.272.524.000, Adapun alokasi anggaran berdasarkan kegiatan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. Alokasi Pagu Stasiun PPMHKP Palu TA 2026

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP	3.387.321.000	3.062.141,000
2	Manajemen Mutu	73.500,000	73.500,000
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	194.800,000	136.883,000
TOTAL		3.655.621,000	3.272.524.000

2.4. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah Realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

$$100 \leq X \leq 120$$

(memenuhi ekspektasi)

$$80 \leq X \leq 100$$

(belum memenuhi ekspektasi)

$$X \leq 100$$

(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

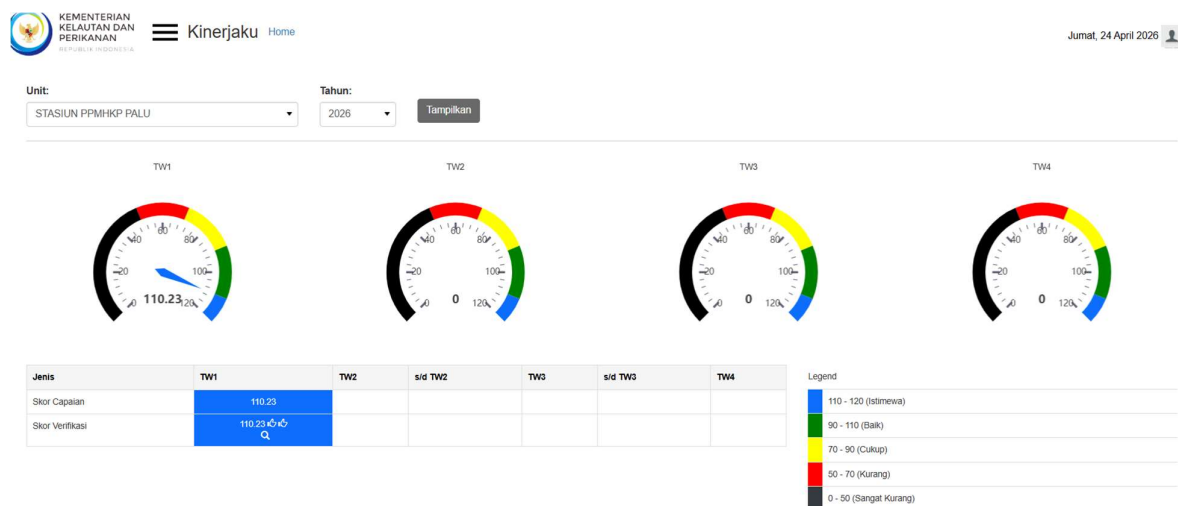
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu (SPPMHKP Palu) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup Stasiun PPMHKP Palu, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SKIPM Palu pada Triwulan I 2026 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 110,23% . Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SPPMHKP Palu pada Triwulan I Tahun 2026 ini capaiannya menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja SPPMHKP Palu pada Triwulan I Tahun 2026 seperti pada Gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Capaian IKU dan IKK SPPMHKP Palu Triwulan I tahun 2026

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis SKIPM Palu pada Triwulan I Tahun 2026 dapat Dilihat Pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Capaian Kinerja SPPMHKP PALU Triwulan I Tahun 2026

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Capaian	
				Target TW.I	Capaian TW.I
Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	72	73 (101,39%)
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	72	69,86 (97,03%)
Kegiatan 2. Pengendalian sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar					
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar.	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	71	81,37 (114,61%)
Kegiatan 3. Dukungan Manajerial Internal Lingkup BPPMHKP					
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Palu	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Indeks)	-	-
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	-	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	-	-
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Persen)	86	100 (116,28%)
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	-	-
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	-	-
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	77	100 (120%)
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Indeks)	3,5	4.0 (114, 29%)

3.2 ANALISA DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program 1.

Sasaran Strategis ***Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan*** menjadi tolok ukur dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan dan Stasiun PPMHKP Palu. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja :

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu (persen)
- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu (persen)

IK.1.01. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Primer yang memenuhi standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produksi hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator ini mempunyai target 72 Persen. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

- Validasi sertifikasi produksi primer
- Inspeksi/Verifikasi ke Lokasi usaha

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator ini mencapai 73 atau ,mencapai 101,39% dari target yaitu 72%

Realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu, seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Target dan Realisasi IK.1.01. pada Triwulan I Tahun 2026

SP1	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu										
Realisasi Tw 1 tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw.1 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target 2026	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	-	72%	72%	73	101,39%	101,39%	72%	101,39%

Ket Realisasi TW I Tahun 2021 s.d 2025 Yaitu: (tahun 2020 s.d 2023: tidak ada IKU)

IK.1.02. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen meliputi : PMMT/HACCP, SPDI dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas,

memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku, dan Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, SPDI dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada Triwulan I Tahun 2026 indikator ini ditargetkan 72 dan terealisasi sebesar 69,86 atau capaian kinerja sebesar 97,03%. Sehingga apabila dilakukan perhitungannya sebagai berikut :

CARA PENGUKURAN	
$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$	X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT ...
A =	Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk yang menerapkan manajemen keamanan diatas standar
B =	Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP diatas standar
C =	Persentase surat keterangan penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier
xn =	Jumlah dari unsur pembentuk

Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP dan melakukan Bimtek Pengendali Mutu Hasil Perikanan, serta validasi pengajuan SKP.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 1 orang fungsional Inspektur mutu dan 2 orang asisten inspektur mutu dari total pegawai ASN SPPMHKP Palu sebanyak 13 orang.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi Teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi honest (HACCP Online System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/login/>. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi honest selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan Tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

Realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu, seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK.1.02. pada Triwulan I Tahun 2026

SP1	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan											
LK.2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu											
Realisasi Tw 1 tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw.1V 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra	
-	-	-	-	100	72%	72%	69,86	97,03%	97,03%	72%	97,03%	

Ket Realisasi TW I Tahun 2021 s.d 2025 Yaitu: (tahun 2021 s.d 2023: tidak ada IKU)

Sasaran Program 2.

Sasaran Strategis *Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar* menjadi tolok ukur dari Pusat Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar dan Stasiun PPMHKP Palu. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja :

- Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)

IK.02.1 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional

Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi)

sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
3. Persyaratan Umum;
5. Persyaratan Sumber Daya;
7. Persyaratan Sistem Manajemen
2. Acuan Normatif;
4. Persyaratan Struktural;
6. Persyaratan Proses;

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025, pelaksanaannya di atur sebagai berikut :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (ISO 17025)
Untuk menilai kompetensi laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 maka KAN akan melakukan asesmen, yang dilakukan terdiri dari 2 tahap, yaitu audit kecukupan (pemeriksaan dokumen mutu terhadap kesesuaiannya dengan persyaratan akreditasi) dan asesmen lapangan untuk melihat efektivitas implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di laboratorium pengujian BPPMHKP PALU.
- Perawatan Sistem
Untuk mendukung penambahan ruang lingkup parameter uji maka perlu dilakukan perawatan sistem salah satunya dengan melakukan kalibrasi alat yang digunakan oleh laboratorium dalam melakukan pengujian. Kalibrasi alat dilakukan dengan onsite yaitu mendatangkan petugas kalibrator dari Lembaga Kalibrasi yang sudah terakreditasi dan outsite yaitu membawa beberapa alat yang tidak bisa dikalibrasi langsung di Laboratorium Uji BPPMHKP PALU.
- Uji Profisiensi/Uji Banding
- Penerapan Standar Metode Pengujian
Untuk menilai kompetensi Inspektur Mutu yang ada di BPPMHKP Palu berdasarkan SNI ISO/IEC 17020:2012 maka KAN akan melakukan penilaian

atas nama klien, organisasi induknya, atau dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kesesuaian barang yang diinspeksi dengan peraturan, standar, spesifikasi, skema inspeksi atau kontrak. Parameter inspeksi mencakup kuantitas, kualitas, keselamatan, dan kesesuaian keselamatan pengoperasian instalasi atau sistem secara terus menerus. Melalui proses asesment dari KAN dapat memastikan jasa inspeksi dari lembaga inspeksi yang ada di BPPMHKP Palu dapat diterima oleh klien dan otoritas pengawas jasa inspeksi.

Sebagai jaminan mutu dalam melakukan pengujian, BPPMHKP PALU mengikuti kegiatan uji profisiensi yang diselenggarakan oleh BUSPM dan uji banding dengan mengirimkan sampel ke laboratorium lain. Keikutsertaan dalam uji banding dan uji profisiensi adalah sebagai unjuk kerja laboratorium dalam melakukan pengujian.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar system manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan system manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 dan 17020 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten.

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator ini mencapai 81,37 atau ,mencapai 114,61% dari target yaitu 71

Realisasi Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup Stasiun PPMHKP Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK.2.01 pada Triwulan I Tahun 2026

SP2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar										
LK.1	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu										
Realisasi Tw I tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw.1 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 V 2026	% Realisasi terhadap target 2026	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	-	71%	71%	81.37	114,61%	114,61%	71%	114,61%

Ket Realisasi TW I Tahun 2021 s.d 2025 Yaitu: (tahun 2021 s.d 2023: tidak ada IKU)

Sasaran Program 3.

Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP

Learn And Growth Perspekt

Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palu pada Learn and Growth Perspect berasal dari sasaran strategis ***Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Lingkungan Stasiun PPMHKP Palu*** dengan terwujudnya aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berintegritas, tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses, terwujudnya kelembagaan yang efektif, efisien dan berorientasi pada hasil, serta terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Lingkungan Stasiun PPMHKP Palu diperoleh dari pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palu
2. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palu
3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palu
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu
7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu
8. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

IK.03.1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi
- b. Kompetensi
- c. Kinerja
- d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA Dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D II/SM	10
1	Pendidikan D I/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar / Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut :

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d dibawah	1

5. Disiplin diukur dari indicator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi :

- Kualifikasi**, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi**, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

☐ Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya

- **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
- **Pejabat Fungsional** wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- **Pejabat Fungsional Umum** wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- **Bagi Pegawai Negeri Sipil** yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;

d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.

b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target indicator ini adalah : menginput sertifikat diklat semua pegawai yang telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2026 sehingga nilai kompetensi bisa meningkat, menginput SKP Tahun 2026 dengan baik

pada aplikasi SKP KKP, disiplin dalam bekerja sehingga meminimalisir terkena hukuman disiplin

Pada Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat realisasi Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK.03.1 pada Triwulan I Tahun 2026

SP3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu											
LK.1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palu											
Realisasi Tw 1 tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw.1 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target 2026	Target	% Cpaian terhadap target Renstra	
-	-	-	-	-	82,5	-	-	-	-	82,5	-	

IK.03.2. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Pada Triwulan I Tahun 2026, belum ada target dan realisasi Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 03.2 pada Triwulan I Tahun 2026

SP3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu											
LK.2	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palu											
Realisasi Tw 1 tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw.1 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target 2026	Target	% Cpaian terhadap target Renstra	
-	-	--	-	-	77	-	-	-	-	77	-	

IK.03.3 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit

Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50–60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Pada Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat target dan realiasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

Tabel 9. Target dan Realisasi IK.03.3 pada Triwulan I Tahun 2026

SP3		Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu									
LK.3		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu									
Realisasi Tw 1 tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2026	Target Tw.1 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target 2026	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	-	86,2	-	-	-	-	86,2	-

IK.03.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara,dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Triwulan I Tahun 2026 indikator ini ditargetkan sebesar 86 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa SPPMHKP Palu pada Triwulan I Tahun 2026 telah menuntaskan 100 % perbaikan

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SPPMHKP Palu didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP dengan periode triwulanan. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\% = \frac{\Sigma Nt}{\Sigma N} \times 100$$

Keterangan:

ΣNt : Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Yang telah di tindak lanjuti SPPMHKP Palu

ΣN : Jumlah rekomen dari Laporan Hasil Pengawasan yang di berikan kepada SPPMHKP Palu

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator ini mencapai 100% atau ,mencapai 116,28% dari target yaitu 86%

Realisasi Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK.03.4 pada Triwulan I Tahun 2026

SP3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu										
LK.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palu										
Realisasi Tw 1 tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw.1 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target 2026	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	100	100	100	86%	86%	100%	116,28%	116,28%	86%	116,28%

IK.03.5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Pada Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat target dan realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

Tabel 11. Target dan Realisasi IK.03.5 pada Triwulan I Tahun 2026

SP3		Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu									
LK.5		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu									
Realisasi Tw 1 tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw.1 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target 2026	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	--	-	-	92.1	-	-	-	-	92,1	-

IK.03.6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam perencanaan Anggaran berdasarkan

Aplikasi Monev Kemenkeu. Belum terdapat realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA).

Pada Triwulan I Tahun 2026, Belum terdapat target dan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

Tabel 12. Target dan Realisasi IK.03.6 pada Triwulan I Tahun 2026

SP3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu											
LK.6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu											
Realisasi Tw 1V tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw.1 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target 2026	Target	% Cpaian terhadap target Renstra	
-	-	-	-	-	71.75	-	-	-	-	71.75	-	

IK.03.7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Palu

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Palu dengan meratakan nilai dari seluruh unsur yaitu : (1) Rencana umum pengadaan yang telah diupload ke Aplikasi SIRUP, (2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE, (3) Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, (4) kesesuaian tahap pelaksanaan. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Palu.

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator ini mencapai 100% atau ,mencapai 120% dari target yaitu 77%

Realisasi Presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada sirup lingkup Stasiun PPMHKP Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK.03.7 pada Triwulan I Tahun 2026

SP3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu										
LK.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Palu										
Realisasi Tw 1 tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw.1 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target 2026	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	100	77%	77%	100%	120%	120%	77%	120%

IK.03.8 Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BPPMHKP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan SurveiKepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang Total}$$

Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun PPMHKP Palu merupakan indikator utama Stasiun PPMHKP Palu dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Se jauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan UPT Stasiun PPMHKP Palu.

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator ini mencapai 4,00 atau ,mencapai 114,29% dari target yaitu 3,5.

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun PPMHKP Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 14. Target dan Realisasi IK.03.8 pada Triwulan I Tahun 2026

SP3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu										
LK.8	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu										
Realisasi Tw 1 tahun 2021 s.d 2025					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw.1 2026	Realisasi Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target Tw.1 2026	% Realisasi terhadap target 2026	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	90,81	97,22	94,44	3.5	3,5	4.0	114.29%	114.29%	3.5	114.29%

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Palu pada tahun anggaran 2026 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi 03 tanggal 01 Desember 2025 Nomor : SP DIPA-032.13.2.649601/2026 sebesar Rp. 3.272.524.000, Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 3.100.524.000 dan PNPB sebesar Rp.172.000.000. Realisasi penyerapan anggaran SPPMHKP Palu pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp. 781.991.019 atau sebesar 23.90 %. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp.82.324.000 atau 2,52%, Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Palu T.A 2026 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 18. dan Tabel 19 berikut ini :

Tabel 15. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TWI	%
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP	3.062.141,000	740.005.219	24,17%
2	Manajemen Mutu	73,500,000	28.326.420	38,54%
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu	136.883.000	13.659.380	9,98%
TOTAL		3.272.524.000	781.991.019	23,90%

Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2026

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW IV	%
1	Belanja Pegawai	2.125.519.000	505.650.736	23,79 %
2	Belanja Barang	1.147.005.000	276.340.283	24.09 %
3	Belanja Modal	0	0	
TOTAL		3.272.524.000	781.991.019	23,90%

Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026 merupakan instrument bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dicapai dan terwujud melalui implementasi strategi pencapaiannya yaitu program dan kegiatan yang bersinergi. Program dan kegiatan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategi tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2026.

Tingkat capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Palu secara keseluruhan berhasil dengan baik atau kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target tujuan yang telah ditetapkan selain dari beberapa kegiatan yang memang target capainnya periode semester atau akhir tahun periode.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 11 indikator kinerja utama, Stasiun PPMHKP Palu tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk menyatukan persepsi agar target indikator kinerja lebih terukur.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap manual IKU menyesuaikan perubahan Indikator Kinerja yang baru.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Akhirnya, Laporan Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Palu Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintah yang baik (good governance). Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (performance plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) Rencana Strategis (Strategi Plan) di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu di masa mendatang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Periode Laporan : Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
Nama IK : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (%)									
T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	72								72
Realisasi	73							73	
%Capaian	101,39%							101,39%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
• Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. • Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. • Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans. • Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu • Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya

dan pengumpulan hasil laut lainnya.

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn}$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Palu

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Hasil Pengukuran Stasiun PPMHKP Palu yang diukur oleh Pusat Mutu Produksi Primer adalah

A. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer UPT lingkup BPPMHKP TW 1 2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
37	Stasiun PPMHKP Palu	72,00	85,00	85,00	65,00	65,00	65,00	73,00	101,39%

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- BPPMHKP Palu saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan,
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Palu terdiri dari:
 - a. Sertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada unit pengolahan ikan;
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada unit pengolahan ikan;
 - c. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) pada kapal perikanan;
 - d. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) pada unit pembenihan;
 - e. Sertifikat Cara BudiDaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada unit budidaya.
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Palu melalui kegiatan Inspeksi baru atau perpanjangan Unit Pengolahan Ikan

dalam rangka sertifikasi PMMT/HACCP, Inspeksi Unit Pengolahan Ikan / UMKM dalam rangka sertifikasi SKP, Surveilans penerapan GMP/SSOP/HACCP dan pengambilan sampel dalam rangka Official Control, dan Evaluasi penerapan system ketertelusuran (traceability) pada unit pengolahan ikan lingkup Stasiun KIPM Palu

- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Palu melalui kegiatan Inspeksi unit budidaya dalam rangka sertifikasi CBIB, Inspeksi unit pembenihan dalam rangka sertifikasi CPIB Pembenihan, Inspeksi diatas kapal dalam rangka sertifikasi CPIB kapal lingkup Stasiun KIPM Palu.
- Kegiatan ini dilaksanakan BPPMHKP dalam mendukung ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu hasil kelautan dan perikanan. UPT Stasiun KIPM Palu menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi. Realisasi dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan target pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- Kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi primer Lingkup UPT SKIPM Palu TW I Tahun 2026

BULAN	REALISASI		
	CBIB	CPIB	CPIB KAPAL
Januari	0	0	0
Februari	1	1	0
Maret	0	0	0

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi produksi primer yakni pelaksanaan Inspeksi CBIB, indentifikasi CPIB Kapal, Inspeksi CPIB Benih. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan adanya kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh unit pembudidaya. Berdasarkan hasil kegiatan pada 1 unit pembudidaya ikan dinyatakan memenuhi syarat dan diterbitkan Sertifikat CBIB sebanyak 1 jenis budidaya ikan, demikian pula dengan Sertifikat CPIB sebanyak 1 unit yaitu Unit Pembenihan Ikan Kota Palu. Dengan demikian pelaksanaan pada Triwulan I ini mencapai 100% dari target 70% sehingga secara persentase tercapai atau sama dengan nilai kinerja maksimal 120%. Adapun bukti dukung realisasi kegiatan “penerbitan sertifikat CBIB” dapat dilihat pada link google drle berikut

<https://drive.google.com/drive/folders/1uIIObITru7gGmlBotl-YLUYPx5nDb0Lj?usp=sharing>

- Kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi primer Lingkup UPT SKIPM Palu TW I TAHUN 2026 berdasarkan data terkini: Telah diterbitkan 1 sertifikat CBIB atas nama Syarifudin Darmansyah Farm dengan nomor Sertifikat ID-CBIB-T-72- dan terdapat pengajuan 2 sertifikasi CBIB yang sudah berproses di OSS, sedangkan CPIB Benih telah dilakukan inspeksi sertifikasi oleh Balai Benih Ikan Air Tawar Kota Palu dan telah diterbitkan dengan nomor sertifikat Nomor ID-CPIB-T-72-260005. Selanjutnya akan dilakukan pengajuan sertifikasi oleh Balai Benih Ikan Air Tawar Lakatan, Tolitoli yang masih proses pemberkasan dari pelaku usaha budidaya. Data potensi CBIB telah teridentifikasi sebanyak 225 unit pembesaran ikan, yang menunjukkan adanya peluang besar untuk penerapan standar keamanan pangan di sektor ini. Jadwal surveilan CBIB telah disusun dan direncanakan dilaksanakan pada bulan November 2026.
- Untuk perikanan tangkap (CPIB Kapal), karena hingga kini belum dilakukan inspeksi karena kendala operasional, yaitu kapal-kapal tersebut masih melakukan aktifitas bongkar muat di wilayah Kalimantan maka diterbitkan surat pembatalan inspeksi.
- Adapun bukti dukung realisasi kegiatan sertifikasi CPIB Kapal” dapat dilihat pada link google drive berikut : <https://drive.google.com/drive/folders/1uIIObITru7gGmlBotl-YLUYPx5nDb0Lj?usp=sharing>



DOKUMENTASI KEGIATAN TW I 2026
PELAKSANAAN SERTIFIKASI CBIB DAN CPIB BENIH
DI STASIUN PPMHKP PALU

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator :

- Selasa, 18 Februari 2026, Telah diterbitkan sertifikat CPIB terhadap 1 unit UPTD Pembenihan Ikan Kota Palu (ikan nila).


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
Ministry of Marine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT
Certificate
Terlana
On
CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)
Good Hatchery Practices

Nomor : ID-CPIB-T-73-269005
Ref. No: ID-CPIB-T-73-269005

Diberikan Kepada :
To Whom it May Concern:

Nama Pemilik/Perusahaan <i>Name of the Company</i>	: UPTD Pembenihan Ikan Kota Palu
Alamat Pemilik/Perusahaan <i>Company Address</i>	: Jl. Lekatu Kel. Tondjuka Kec. Tatanga Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Jenis Produk <i>Commodity</i>	: Benih Ikan Nila
Reduksi sampai dengan <i>Valid until</i>	: 18 Februari 2030
Peringkat <i>Grade</i>	: Baik

Telah memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik
Qualified for Good Fish Hatchery Practices requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in :
Tanggal : 18 Februari 2026
Date

K.P. Menteri Kelautan dan Perikanan
Republic of Indonesia
On behalf of
Minister of Marine Affairs and Fisheries
of The Republic of Indonesia

Kapala Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Director General of Marine and Fisheries
Quality Assurance Agency


R. Whartini

Adapun bukti dukung realisasi kegiatan “penerbitan sertifikat CBIB” dapat dilihat pada link google drive berikut : <https://drive.google.com/drive/folders/1uIIObITru7gGmlBotl-YLUYPx5nDb0Lj?usp=sharing>

•

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya Melakukan koordinasi dengan pihak UPI, Unit budidaya, pembenihan, supplier, dan unit kapal terkait Sertifikasi sebagai bagian dari upaya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
---	--

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Produksi Primer

Palu, 16 April 2026 Kepala



Hamzah, S.Pi, M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3860527
LAMARAN www.kkp.go.id

Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026 15 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja "Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan" Triwulan I Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
Di Tempat

Sehubungan dengan Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Triwulan I tahun 2026 bersama ini kami sampaikan nilai capaian Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan 1 tahun 2026 untuk digunakan sebagai data pendukung IKU UPT yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan. (Rincian Terlampir)

Demikian kami menyampaikan, atas perkenan dan dukungan baik yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Nomor : B. 299 /BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026

Tanggal : 15 April 2026

A. Daftar Nama Penerima

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I;
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I;
3. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang;
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung;
5. Plt. Kepala Balai PPMHKP Jakarta;
6. Plt. Kepala Balai PPMHKP Semarang;
7. Plt. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II;
8. Plt. Kepala Balai PPMHKP Entikong;
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan;
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru;
11. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tarakan;
12. Plt. Kepala Balai PPMHKP Denpasar;
13. Plt. Kepala Balai PPMHKP Mataram;
14. Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar;
15. Plt. Kepala Balai PPMHKP Manado;
16. Plt. Kepala Balai PPMHKP Ambon;
17. Plt. Kepala Balai PPMHKP Jayapura;
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh;
19. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Medan II;
20. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balia Asahan;
21. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Padang;
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru;
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi;
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang;
25. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu;
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang;
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam;
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak;
29. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung;
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon;
31. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak;
33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya;
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang;
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima;
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju;
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu;
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai;
39. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari;

- 40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau;
- 41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo;
- 42. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna;
- 43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate;
- 44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong;
- 45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Muhammad Hatta Arisandi

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026
 Tanggal : 15 April 2026

A. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer UPT lingkup BPPMHKP
 TW 1 2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	89,44	71,00	70,00	90,00	89,33	81,95	113,83%
2	Balai PPMHKP Medan I	72,00	80,17	70,00	70,00	70,00	70,00	72,03	100,05%
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	85,83	73,57	102,18%
4	Balai PPMHKP Lampung	72,00	88,33	71,00	70,00	90,00	70,00	77,87	108,15%
5	Balai PPMHKP Jakarta	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	90,00	78,00	108,33%
6	Balai PPMHKP Semarang	72,00	71,00	70,00	88,33	70,00	90,00	77,87	108,15%
7	Balai PPMHKP Surabaya II	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,20	97,50%
8	Balai PPMHKP Entikong	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
9	Balai PPMHHKP Balikpapan	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	72,00	89,17	90,00	70,00	70,00	89,67	81,77	113,57%
11	Balai PPMHKP Tarakan	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
12	Balai PPMHKP Denpasar	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,40	103,33%
13	Balai PPMHKP Mataram	72,00	89,44	70,00	70,00	70,00	70,00	73,89	102,62%
14	Balai PPMHKP Manado	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
15	Balai PPMHKP Makassar	72,00	81,00	70,00	70,00	70,00	90,00	76,20	105,83%
16	Balai PPMHKP Ambon	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	88,75	73,95	102,71%
17	Balai PPMHKP Jayapura	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
19	Stasiun PPMHKP Medan II	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
21	Stasiun PPMHKP Padang	72,00	71,00	71,00	65,00	65,00	85,00	71,40	99,17%
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72,00	94,17	77,67	65,00	65,00	85,00	77,37	107,46%

23	Stasiun PPMHKP Jambi	72,00	90,00	90,00	70,00	70,00	70,00	78,00	108,33%
24	Stasiun PPMHKP Palembang	72,00	70,00	88,33	70,00	70,00	66,67	73,00	101,39%
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72,00	90,00	70,00	65,00	65,00	83,33	74,67	103,70%
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72,00	88,33	70,00	70,00	70,00	70,00	73,67	102,31%
27	Stasiun PPMHKP Batam	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
28	Stasiun PPMHKP Merak	72,00	88,33	90,00	88,33	70,00	70,00	81,33	112,96%
29	Stasiun PPMHKP Bandung	72,00	84,44	85,00	83,33	65,00	65,00	76,55	106,33%
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	65,00	69,40	96,39%
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	88,33	73,87	102,59%
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	72,00	86,00	70,00	70,00	70,00	70,00	73,20	101,67%
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
34	Stasiun PPMHKP Kupang	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
35	Stasiun PPMHKP Bima	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	72,00	66,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,20	90,56%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72,00	85,00	85,00	65,00	65,00	65,00	73,00	101,39%
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
39	Stasiun PPMHKP Kendari	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,00	102,78%
40	Stasiun PPMHKP Baubau	72,00	83,67	70,00	70,00	70,00	88,33	76,40	106,11%
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72,00	84,17	66,00	65,00	65,00	65,00	69,03	95,88%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
43	Stasiun PPMHKP Ternate	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
44	Stasiun PPMHKP Sorong	72,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	68,00	94,44%
45	Stasiun PPMHKP Merauke	72,00	71,67	70,83	65,00	65,00	65,00	67,50	93,75%
	Jumlah		3430,33	3226,83	3130,00	3115,00	3415,25	3263,48	
	% Realisasi IKU Primer		76,23	71,71	69,56	69,22	75,89	72,52	
	% Capaian IKU Primer		107,37	102,44	92,74	92,30	105,41	100,72	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan sebesar 72,52%

2. Capaian Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 72% adalah 100,72%

Rumus (realisasi/target x 100%)= $(72,52/72) \times 100\% = 100,72\%$

B. Link Drive

Sertifikasi CDOIB-CPOIB dan CPPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W29wYoHcLUaYxrWWx772Ost5cjiaxRzR/edit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true>

Sertifikasi CPIB Kapal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TNIUPD_Zudp61bfvNAdGO-wXvNfSoX-0/edit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true

Sertifikasi CBIB - CPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fzFfp7Wf6md8xgbTQh9TGQllyqaUt-DAPlh1Nw6pwio/edit?gid=1937912344#gid=1937912344>

C. Manual IKU Pusat Mutu Produksi Primer 2026

<https://drive.google.com/file/d/1zHOyWrDwH1-E3VDI3il15DUm3Q8atCnV/view?usp=sharing>

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun PPMHKP Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun PPMHKP Palu
Nama Timja : Pengendalian dan pengawasan mutu produksi pascapanen
Periode Laporan : Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
Nama IK : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu (%)									
T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	72								72
Realisasi	69,86							69,86	
%Capaian	97,03%							97,03%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten baik dalam bentuk sertifikat. - Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. - Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. - Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: - Standar Nasional Indonesia (SNI); - Standar Internasional (Codex Alimentarius); - Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. - Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang

ditangani dan/atau diolah.

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT ...
A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk yang menerapkan manajemen keamanan diatas standar
B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP diatas standar
C = Persentase surat keterangan penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier
xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Hasil capaian Stasiun PPMHKP Palu Yaitu:

CAPAIAN IKU TRIWULAN I TAHUN 2026						
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN						
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PASCAPANEN						
No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	65,56%	81,53%	62,50%	69,86%

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen UPT Stasiun PPMHKP Palu merupakan salah satu tim kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan layanan penjaminan mutu produksi pascapanen pada area kerja UPT Stasiun PPMHKP Palu (Kota Palu, Kab Sigi, Kab Donggala, Kab Parigi, Kab Poso, Kab Toli-toli, dan Kabupaten Buol).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka

memenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

- BPPMHKP Palu saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan,
- Sertifikasi pengendalian dan pengawasan mutu produksi pascapanen pada Unit pelaksana Teknis (UPT) Stasiun PPMHKP Palu terdiri dari:
 - a. Penerbitan sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMHKP)
 - b. Penerbitan sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada unit pengolahan ikan;
 - c. Penerbitan sertifikat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada unit pengolahan ikan; serta;
 - d. Penerbitan sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Palu melalui kegiatan Inspeksi baru atau perpanjangan Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi PMMT/HACCP, Inspeksi Unit Pengolahan Ikan / UMKM dalam rangka sertifikasi SKP, Surveilen penerapan GMP/SSOP/HACCP dan pengambilan sampel dalam rangka Official Control, dan Evaluasi penerapan system ketertelusuran (traceability) pada unit pengolahan ikan lingkup Stasiun PPMHKP Palu
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Palu melalui kegiatan Inspeksi unit budidaya dalam rangka sertifikasi CBIB, Inspeksi unit pembenihan dalam rangka sertifikasi CPIB Pembenihan, Inspeksi diatas kapal dalam rangka sertifikasi CPIB kapal lingkup Stasiun PPMHKP Palu.
- Kegiatan ini dilaksanakan BPPMHKP dalam mendukung ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu hasil kelautan dan perikanan. UPT Stasiun PPMHKP Palu

menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi. Realisasi dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan target pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

- UPT Stasiun PPMHKP Palu pada Triwulan I tahun 2026 telah menerbitkan Sertifikat Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SMHKP) sebagaimana table berikut :

BULAN	REALISASI		
	Jumlah sertifikat	Volume (KGM)	Nilai USD
Januari	17	2.627	12,480.5
Februari	20	3.572	16,979.9
MAret	16	2.516	11,892.3

- UPT Stasiun PPMHKP Palu pada Triwulan I tahun 2026 melakukan kegiatan layanan sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), data sertifikat yang diterbitkan sebagaimana table berikut :

BULAN	REALISASI	
	UPI	RL Produk
Januari	2	2
Februari	5	5
MAret	7	31

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi pasca panen untuk target Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan yaitu sebanyak 14 UPI dan 38 Ruang lingkup Produk..

- UPT Stasiun pada Triwulan I tahun 2026 tidak menerbitkan sertifikat Program manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) hal ini disebabkan karena tidak adanya permohonan baru terhadap penebitas sertifikat.
- UPT Stasiun PPMHKP Palu pada Triwulan I tahun 2026 melakukan kegiatan Pengawasan mutu (surveilans) *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) sebagaimana table berikut :

BULAN	REALISASI		
	UPI GRADE A	UPI GRADE B	UPI GRADE C
Januari	0	0	0
Februari	0	1 UPI, 3 Ruang Lingkup	0
MAret	0	0	0

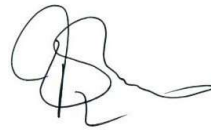
Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi

pasca panen yakni pelaksanaan Surveilans HACCP dan pengambilan sampel dalam rangka Official Control di Unit pengolahan sebanyak 1 kali (3 Ruang lingkup) dengan metode Inspeksi onsite.

Adapun bukti dukung relaisasi kegiatan telah dilampirkan pada link google drive

berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1NOO-0FsS9hB6rgoUHZj_xeay2d992aQR?usp=sharing

Palu, 16 April 2026
Katimja Pacapanen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irmawan Syafirianto', with a stylized, flowing script.

Irmawan syafirianto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR
16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP
10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 16 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan BPPMHKP periode Triwulan 1 Tahun 2026, bersama ini terlampir disampaikan nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen untuk digunakan sebagai data pengukuran IKU UPT, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto

Tembusan:
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran

Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026

Tanggal : 16 April 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT BPPMHKP

1. Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya
2. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I
3. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang
4. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung
5. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
6. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang
7. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II
8. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
9. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan
10. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru
11. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan
12. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar
13. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram
14. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
15. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
16. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon
17. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura
18. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh
19. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II
20. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan Tanjung Balai Asahan

21. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
22. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
23. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
24. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
25. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
26. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
27. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam
28. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
29. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung
30. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
31. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
32. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak
33. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
34. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
35. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
36. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
37. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
38. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
39. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari
40. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
41. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
42. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
43. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate

44. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong
45. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto

**NILAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PASCAPANEN
TRIWULAN I TAHUN 2026**

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	93,20%	86,95%	75,00%	85,05%
2	Balai PPMHKP Ambon	72%	98,34%	90,00%	62,50%	83,61%
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72%	91,67%	83,34%	75,00%	83,34%
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72%	97,00%	98,67%	75,00%	90,22%
5	Balai PPMHKP Denpasar	72%	98,89%	96,67%	75,00%	90,19%
6	Balai PPMHKP Entikong	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
7	Balai PPMHKP Jakarta	72%	90,23%	89,38%	91,06%	90,22%
8	Balai PPMHKP Jayapura	72%	70,00%	90,83%	62,50%	74,44%
9	Balai PPMHKP Lampung	72%	98,34%	90,00%	75,00%	87,78%
10	Balai PPMHKP Makassar	72%	93,75%	90,56%	80,00%	88,10%
11	Balai PPMHKP Manado	72%	88,55%	84,92%	75,00%	82,82%
12	Balai PPMHKP Mataram	72%	93,62%	90,65%	75,00%	86,42%
13	Balai PPMHKP Medan I	72%	93,70%	91,06%	75,00%	86,59%
14	Balai PPMHKP Semarang	72%	93,89%	91,53%	75,00%	86,81%
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72%	95,42%	89,76%	62,50%	82,56%
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72%	91,39%	90,27%	75,00%	85,55%
17	Balai PPMHKP Tarakan	72%	93,74%	89,29%	75,00%	86,01%
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72%	87,24%	78,90%	75,00%	80,38%
20	Stasiun PPMHKP Batam	72%	85,74%	84,62%	62,50%	77,62%
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	90,89%	70,33%	87,50%	82,91%
23	Stasiun PPMHKP Bima	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72%	98,34%	90,00%	87,50%	91,95%
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72%	73,89%	76,11%	87,50%	79,17%
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72%	68,33%	86,35%	75,00%	76,56%
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72%	99,17%	100,00%	62,50%	87,22%
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72%	90,88%	89,77%	75,00%	85,22%
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72%	77,78%	93,89%	75,00%	82,22%
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	66,68%	66,68%	75,00%	69,45%
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72%	91,93%	90,14%	75,00%	85,69%
32	Stasiun PPMHKP Merak	72%	73,82%	73,82%	62,50%	70,05%
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
34	Stasiun PPMHKP Padang	72%	54,43%	76,65%	75,00%	68,69%
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72%	54,43%	73,87%	75,00%	67,77%

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72%	77,78%	97,22%	78,97%	84,66%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	65,56%	81,53%	62,50%	69,86%
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72%	97,78%	97,22%	62,50%	85,83%
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72%	92,22%	92,78%	62,50%	82,50%
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72%	67,78%	80,00%	62,50%	70,09%
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72%	77,78%	90,00%	62,50%	76,76%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72%	54,43%	54,43%	62,50%	57,12%
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	100,00%	94,72%	62,50%	85,74%
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72%	74,45%	93,89%	75,00%	81,11%
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72%	100,00%	77,78%	75,00%	84,26%

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
 Nama Timja : Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (MM)
 Periode Laporan : Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar									
Nama IK : Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)									
T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	71								71
Realisasi	81,37							81,37	
%Capaian	114,61%							114,61%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional - Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi - ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri - Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium <i>official control</i> yang dinilai melingkupi: 1. Ruang Lingkup; 3. Persyaratan Umum; 5. Persyaratan Sumber Daya; 7.

Persyaratan Sistem Manajemen

- 2. Acuan Normatif; 4. Persyaratan Struktural; 6. Persyaratan Proses;
- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:
 - 1. Persyaratan Umum 2. Persyaratan Struktural 3. Persyaratan Sumberdaya
 - 4. Persyaratan Proses 5. Persyaratan Sistem Manajemen

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$$

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS)

B = Presentase Penerapan ISO 17025

Nilai implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan oleh Pusat Manajemen Mutu terhadap Stasiun PPMHKP Palu Adalah 81,37 dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Adalah 81,53
2. Nilai Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Adalah 81,21

Aspek keamanan produk perikanan adalah bagian dari keseluruhan mutu produk perikanan yang bersifat wajib. Masalah keracunan dan kontaminasi pada produk perikanan menjadi perhatian konsumen di seluruh dunia, sehingga masalah mutu dan keamanan produk perikanan menjadi sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi

Dalam rangka mendukung pengendalian pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan oleh otoritas kompeten, Kepala Badan selaku koordinator manajer puncak menetapkan :

- a. laboratorium acuan;
- b. laboratorium penguji; dan
- c. lembaga inspeksi.

Laboratorium penguji merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan parameter uji yang diperlukan dan telah terakreditasi oleh komite akreditasi nasional.

Untuk mendukung keberhasilan system jaminan mutu yang akan diselenggarakan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu memberikan dukungan berupa alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dengan rangkaian kegiatan didalamnya antara lain : Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (ISO 17025), Perawatan Sistem, Uji Profisiensi/ Uji Banding.

Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025, pelaksanaannya di atur sebagai berikut :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (ISO 17025)
Untuk menilai kompetensi laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 maka KAN akan melakukan asesmen, yang dilakukan terdiri dari 2 tahap, yaitu audit kecukupan (pemeriksaan dokumen mutu terhadap kesesuaiannya dengan persyaratan akreditasi) dan asesmen lapangan untuk melihat efektivitas implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di laboratorium pengujian BPPMHKP PALU.
- Perawatan Sistem
Untuk mendukung penambahan ruang lingkup parameter uji maka perlu dilakukan perawatan sistem salah satunya dengan melakukan kalibrasi alat yang digunakan oleh laboratorium dalam melakukan pengujian. Kalibrasi alat dilakukan dengan onsite yaitu mendatangkan petugas kalibrator dari Lembaga Kalibrasi yang sudah terakreditasi dan outsite yaitu membawa beberapa alat yang tidak bisa dikalibrasi langsung di Laboratorium Uji BPPMHKP PALU.
- Uji Profisiensi/Uji Banding
Sebagai jaminan mutu dalam melakukan pengujian, BPPMHKP PALU mengikuti kegiatan uji profisiensi yang diselenggarakan oleh BUSKIPM dan uji banding dengan mengirimkan sampel ke laboratorium lain. Keikutsertaan dalam uji banding dan uji profisiensi adalah

sebagai unjuk kerja laboratorium dalam melakukan pengujian.

- **Penguatan system manajemen mutu lembaga inspeksi**

Untuk menilai kompetensi Inspektur Mutu yang ada di BPPMHKP PALU berdasarkan SNI ISO/IEC 17020:2012 maka KAN akan melakukan penilaian atas nama klien, organisasi induknya, atau dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kesesuaian barang yang diinspeksi dengan peraturan, standar, spesifikasi, skema inspeksi atau kontrak. Parameter inspeksi mencakup kuantitas, kualitas, keselamatan, dan kesesuaian keselamatan pengoperasian instalasi atau sistem secara terus menerus. Melalui proses asesment dari KAN dapat memastikan jasa inspeksi dari lembaga inspeksi yang ada di BPPMHKP PALU dapat diterima oleh klien dan otoritas pengawas jasa inspeksi.

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya Melakukan koorsinasi dengan Pusat Manajemen Mutu	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu
Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan


Palu, 16 April 2026
Kepala

Hamzah, S,Pi, M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.456/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Capaian Kinerja Sistem
Manajemen Mutu Triwulan I Tahun 2026

9 April 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka pengisian capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 81,87 didapatkan dari 11 laboratorium (daftar seperti pada Lampiran 1). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 76, maka nilai realisasi sebesar 107,72%; dan
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar 83,26 didapatkan dari 10 lembaga inspeksi (daftar seperti pada Lampiran 2). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 76, maka nilai realisasi sebesar 109,55%.
3. Untuk UPT yang telah dilakukan penilaian pada Triwulan I Tahun 2026, menggunakan hasil penilaian masing-masing UPT. Sedangkan UPT yang belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ahmad Jauhari

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran I. Tujuan Surat
Nomor : B.456/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2026
Tanggal : 9 April 2026

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I
3. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung
5. Plt. Kepala Balai PPMHKP Jakarta
6. Plt. Kepala Balai PPMHKP Semarang
7. Plt. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II
8. Plt. Kepala Balai PPMHKP Entikong
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru
11. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tarakan
12. Plt. Kepala Balai PPMHKP Denpasar
13. Plt. Kepala Balai PPMHKP Mataram
14. Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar
15. Plt. Kepala Balai PPMHKP Manado
16. Plt. Kepala Balai PPMHKP Ambon
17. Balai PPMHKP Jayapura
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh
19. Plt. Stasiun PPMHKP Medan II
20. Plt. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
21. Plt. Stasiun PPMHKP Padang
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang
25. Plt. Stasiun PPMHKP Bengkulu
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak
29. Plt. Stasiun PPMHKP Bandung
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon
31. Plt. Stasiun PPMHKP Yogyakarta
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak

33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai
39. Plt. Stasiun PPMHKP Kendari
40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau
41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo
42. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna
43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate
44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong
45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke
46. Plt. BUSPM Jakarta

Plh. Kepala Pusat Manajemen Mutu



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ahmad Jauhari

Lampiran II. Tabel Nilai
 Nomor : B.456/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2026
 Tanggal : 9 April 2026

1. Tabel Nilai Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No	Unit Kerja	Target	Nilai	Status
1	Laboratorium UPT BPPMHKP Medan I	76	77,63	Memenuhi
2	Laboratorium UPT BPPMHKP Surabaya I		76,19	Memenuhi
3	Laboratorium UPT BPPMHKP Palu		81,53	Memenuhi
4	Laboratorium UPT BPPMHKP Batam		80,70	Memenuhi
5	Laboratorium UPT BPPMHKP Jayapura		76,71	Memenuhi
6	Laboratorium UPT BPPMHKP Banjarbaru		98,21	Memenuhi
7	Laboratorium UPT BPPMHKP Medan II		83,68	Memenuhi
8	Laboratorium UPT BPPMHKP Palangkaraya		78,24	Memenuhi
9	Laboratorium UPT BPPMHKP Tarakan		80,13	Memenuhi
10	Laboratorium UPT BPPMHKP Aceh		81,50	Memenuhi
11	Laboratorium UPT BPPMHKP Tanjung Pinang		86,04	Memenuhi
	Rata-rata	76	81,87	Memenuhi

2. Tabel Rekapitulasi Nilai Per Klausul Per Lokasi

	Medan	SBY I	Palu	Batam	Jayapura	Banjarbaru	Medan II	Palangkaraya	Tarakan	Aceh	Tanjung Pinang
Klausul 1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Klausul 2	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Klausul 3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3
Klausul 4	13	11	14	11	13	15	14	15	15	13	13
Klausul 5	8	12	12	9	11	12	12	12	12	12	11
Klausul 6	47	52	46	47	44	60	55	46	57	50	50
Klausul 7	45	68	57	65	55	59	74	63	71	56	60
Klausul 8	51	41	46	43	47	54	48	48	47	42	44
Jumlah Total	170	192	181	184	179	209	212	193	211	181	190
Nilai	77,63	76,19	81,53	80,70	76,71	98,21	83,68	78,24	80,13	81,50	86,00

Plh. Kepala Pusat Manajemen Mutu

Ditandatangani
Secara Elektronik

Ahmad Jauhari

Lampiran III. Tabel Nilai Penerapan
 Nomor : B.456/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2026
 Tanggal : 9 April 2025

1. Tabel Nilai Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi

No.	Unit Kerja	Target	Nilai	Status
1	Stasiun PPMHKP Jambi	76	77,22	Memenuhi
2	Balai PPMHKP Medan I		76,40	Memenuhi
3	Balai PPMHKP Palu		81,21	Memenuhi
4	Balai PPMHKP Batam		83,63	Memenuhi
5	Balai PPMHKP Banjarbaru		97,57	Memenuhi
6	Balai PPMHKP Ternate		78,00	Memenuhi
7	Balai PPMHKP Tarakan		76,84	Memenuhi
8	Balai PPMHKP Aceh		84,20	Memenuhi
9	Balai PPMHKP Tanjung Pinang		84,28	Memenuhi
10	Balai KIPM Surabaya II		93,20	Memenuhi
Nilai Rata-Rata			83.26	

2. Tabel Rekapitulasi Nilai Per Klausul Per Lokasi

Klausul	Jambi	Medan I	Palu	Batam	Banjarbaru	Ternate	Tarakan	Aceh	Tj.Pinang	Sby 2
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2
3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
4	5	8	7	8	9	8	9	7	5	8
5	7	6	6	7	9	7	5	8	9	9
6	28	23	21	23	27	26	29	25	26	28
7	41	44	49	44	50	45	48	47	40	46
8	50	50	43	48	54	48	46	48	45	52
Jumlah Total	139	140	134	138	158	143	146	144	134	151
Nilai	77,22	76,40	81,21	83,64	97,58	78,00	76,84	84,21	84,28	93,21

Plh. Kepala Pusat Manajemen Mutu

Ditandatangani
Secara Elektronik

Ahmad Jauhari

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dilingkungan Stasiun PPMHKP Palu									
Nama IK : PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP Stasiun PPMHKP Palu									
T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	86								86
Realisasi	100							100	
%Capaian	116,28%							116,28%	

Catatan:

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

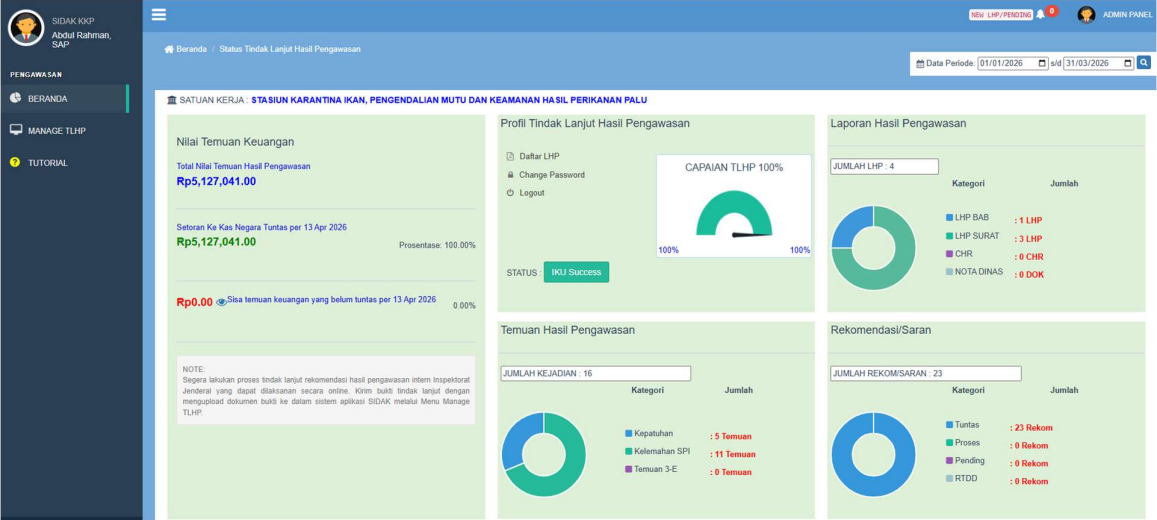
Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Berdasarkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Stasiun PPMHKP Palu berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Stasiun PPMHKP Palu yang menjadi objek pengawasan. - Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP. - Adapun cara pengukurannya sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$ $\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$

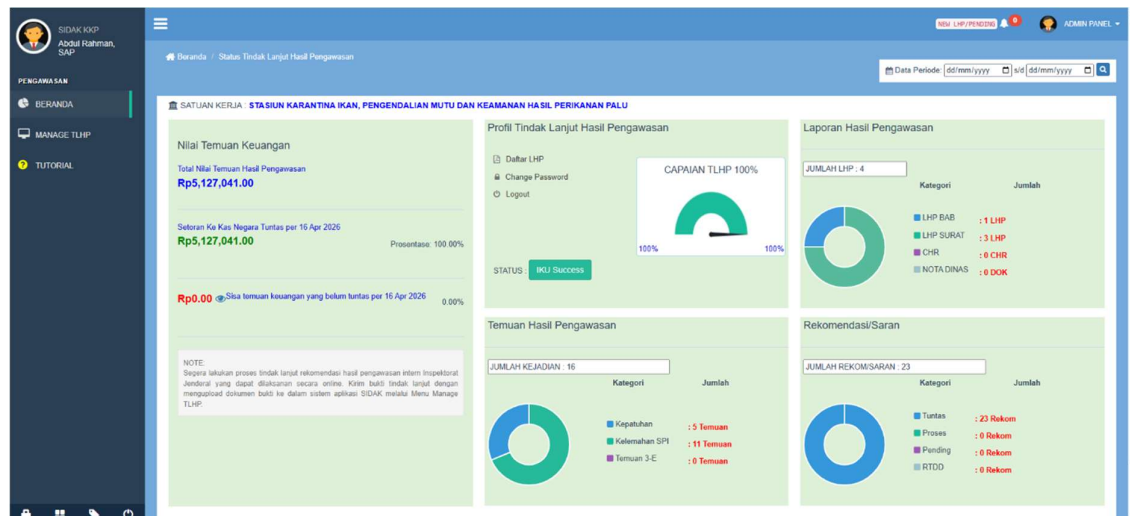
Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi	
Hasil Monitoring Aplikasi SIDAK KKP sebagai saran bagi UPT Stasiun PPMHKP Palu untuk selalu melihat dan menindaklanjuti segala temuan dari Inspektorat Jenderal KKP dan Audit Eksternal Lainnya yang telah koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP Dari hasil Monitoring Aplikasi SIDAK KKP Stasiun PPMHKP Palu Pada TW I 2026 bahwa temuan pengawasan sebanyak 16 dan jumlah rekomendasi 23. Dari jumlah temuan pengawasan dan rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti semuanya. Sehingga nilai Realisasi Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu pada TW I 2026 sebesar 100 % atau capaian kinerja sebesar 116,27 %	
	

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Pada TW I 2026 secara setiap bulannya dilakukan monitoring aplikasi SIDAK KKP. Dan apabila ada temuan dari Inspektorat Jenderal KKP atau audit eksternal lainnya yang masuk dalam aplikasi SIDAK untuk segera di tindaklanjuti	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
-	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Palu, 16 April 2026
kepala


 Hamzah, S. Pi, M. Si

REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN STASIUN PPMHKP PALU TW 1 TAHUN 2026





SIDAK KOP
Abdul Rahman,
SAP

[HOME](#) / [BADAN PPMHP](#) / [STASUSIN KARANTINA IKAN](#), [PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU](#)

New LRP/Pengins
3

PENCARASAN

- BERANDA
- MANAGE TLP*
- TUTORIAL

Jumlah Laporan : 4 Dokumen
Jumlah Terimaan : 16 Terimaan
Jumlah Rekomendasi : 22
Nilai Keuangan : Rp6.127.841

Tuntas : 22 Rekomendasi
Proses : 0 Rekomendasi
Pending : 0 Rekomendasi
Sisa Nilai Keuangan : Rp0

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LRP	Tanggal Berangkat	Obyek Pengawasan	Status	Aksi
2737	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Pemeriksaan	T.2411TJ.4NP.550/X/2023	2023-10-19	Hasil Pemeriksaan Penanggulangan Keuangan Negara Tahun 2023 2403 Status KPRM Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	TUNTAS	Q Detail
1768	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Pemeriksaan	R.4RTJ.4NP.550/X/2022	2022-01-03	Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Remuksi Gedung Pelayanan Status KPRM Palu	TUNTAS	Q Detail
1577	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Pemeriksaan	R.19-02TJ.4NP.550/X/2021	2021-09-20	Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pengangkutan Remuksi Gedung Kantor outstading contract 2021 di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (Stasiun KPRM) Palu Provies Sulawesi Tengah	TUNTAS	Q Detail
1356	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Evaluasi	14.04.10TJ.4NP.470/W/2021	2021-04-14	Hasil Evaluasi PPMHP TA.2020/2021 pada SKUPM Palu	TUNTAS	Q Detail

Showing 1 to 4 of 4 entries

[Previous](#)
[Next](#)

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan : Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu									
Nama IK : NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) LINGKUP STASIUN PPMHKP PALU (IKU)									
T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	77								77
Realisasi	100							100	
%Capaian	120%							120%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya. - Suatu Ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Formula Perhitungan : Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP = $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Hasil rekapitulasi data perhitungan capaian indikator kinerja untuk presentase rencana umum pengadaan TW1 tahun anggaran 2026 Stasiun PPMHKP Palu yaitu: 100%.

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 1 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB sebesar 99,75%. (daftar rekapitulasi terampir);

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000	160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000	574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000	784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000	928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000	493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000	195,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000	380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000	171,170,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000	978,651,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000	996,270,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000	903,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000	748,892,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	858,250,000	858,250,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000	390,073,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000	397,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000	754,512,000	0	100.00%	
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000	833,020,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	508,760,000	508,760,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TJ. BALAI ASAHAN	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000	705,319,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
-	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
-	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Palu, 07 April 2026

Kepala



Hamzah, S.Pi, M.Si

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 1 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB sebesar **99,75%**. (daftar rekapitulasi terampir);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					% Target IKU TW 1	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan		% Capaian	Keterangan
1	01	Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai	85.00	100.00%	Capaian target maksimal
2	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
3	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai	75.00	100.00%	Capaian target maksimal
4	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
5	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
6	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
7	02	Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan	77.00	99,99%	Capaian melebihi target
8	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan	77.00	99,99%	Capaian melebihi target
9	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan	76.00	99.48%	Capaian melebihi target
10	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan	77.00	97.79%	Capaian melebihi target
TOTAL			156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIH TARGET



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

 (01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
	01	SEKRETARIAT JENDERAL	470,068,437,000	470,068,437,000			
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14,473,809,000	14,473,809,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	447,214,323,000	447,214,323,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,380,305,000	8,380,305,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	19,484,769,000	19,484,769,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	1,143,921,000	1,143,921,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000	526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000	942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000	922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000	1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000	1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000	2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000	388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000	872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000	23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMKHP	222,620,591,000	222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000	228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000	132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000	264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000	753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000	683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000	160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000	574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000	784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000	928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000	493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000	195,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000	380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000	171,170,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000	978,651,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000	996,270,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000	903,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000	748,892,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	858,250,000	858,250,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000	390,073,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000	397,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000	754,512,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000	833,020,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	508,760,000	508,760,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TJ. BALAI ASAHAN	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000	705,319,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
08	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT		50,518,334,000	50,518,334,000			
1	417154	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		758,474,978,000	758,474,978,000			
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,299,569,000	20,299,569,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	16,681,384,000	16,681,384,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	20,840,752,000	20,840,752,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000	18,809,471,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,211,781,000	15,211,781,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000	21,461,321,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	549,904,060,000	549,904,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000	16,852,683,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,740,296,000	18,740,296,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,711,004,000	9,711,004,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,617,665,000	7,617,665,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	13,622,708,000	13,622,708,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	12,492,975,000	12,492,975,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,671,447,000	9,671,447,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,557,862,000	6,557,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan – 42 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000	326,938,554,000			
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	990,954,000	990,954,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	403827	BBR BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	403835	BBR PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	4,985,346,000	4,985,346,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	403836	BBR SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,643,813,000	1,643,813,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	238755	BPPP AMBON	16,013,469,000	16,013,469,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	238762	BPPP BANYUWANGI	6,245,814,000	6,245,814,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239260	BPPP BITUNG	12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	238741	BPPP MEDAN	4,518,648,000	4,518,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239188	BPPP TEGAL	39,950,140,000	39,950,140,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	653526	BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI	5,196,446,000	5,196,446,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,868,988,000	2,868,988,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	3,231,545,000	3,231,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,104,748,000	2,104,748,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	403828	BRP BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,817,145,000	6,817,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	403829	BRP BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,759,499,000	7,759,499,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,093,050,000	1,093,050,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	403823	BRP PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,931,859,000	6,931,859,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,466,192,000	1,466,192,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,219,765,000	1,219,765,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	928,933,000	928,933,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,701,958,000	1,701,958,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000	326,938,554,000			
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,730,900,000	1,730,900,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000	57,281,778,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000	2,633,984,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	3,306,385,000	3,306,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,655,559,000	12,655,559,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,047,982,000	2,047,982,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	19,357,989,000	19,357,989,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,823,939,000	1,823,939,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000	2,467,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	18,089,136,000	18,089,136,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,759,647,000	5,759,647,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,980,873,000	7,980,873,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	652009	SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG	4,715,445,000	4,715,445,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	427551	SUPM LADONG	2,407,153,000	2,407,153,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	427573	SUPM PARIAMAN	4,821,203,000	4,821,203,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	427582	SUPM PONTIANAK	1,668,251,000	1,668,251,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	427630	SUPM SORONG	1,336,284,000	1,336,284,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	237373	SUPM TEGAL	4,040,473,000	4,040,473,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	427618	SUPM WAEHERU	2,018,843,000	2,018,843,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PPSDM KP	34,580,706,000	34,580,706,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	1,759,090,000	1,759,090,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		6,234,837,443,000	6,234,837,443,000			
1	239150	BBPI SEMARANG	4,266,256,000	4,266,256,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622461	PPN AMBON	2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427692	PPN BRONDONG	5,550,267,000	5,550,267,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	239146	PPN KARANGANTU	4,975,865,000	4,975,865,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622482	PPN KEJAWANAN	76,447,767,000	76,447,767,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	310719	PPN KWANDANG	3,808,313,000	3,808,313,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239171	PPN PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	560393	PPN PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239991	PPN PEMANGKAT	2,169,663,000	2,169,663,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	633693	PPN PENGAMBENGAN	277,833,054,000	277,833,054,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	427670	PPN PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	560401	PPN SIBOLGA	3,526,343,000	3,526,343,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	239214	PPN SUNGAILIAT	3,715,198,000	3,715,198,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	239221	PPN TANJUNG PANDAN	1,437,176,000	1,437,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	427661	PPN TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	622475	PPN TUAL	2,121,021,000	2,121,021,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	239235	PPP TELUK BATANG	2,044,222,000	2,044,222,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	427655	PPS BELAWAN	8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	633707	PPS BITUNG	10,659,664,000	10,659,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	531488	PPS BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	518117	PPS CILACAP	10,461,664,000	10,461,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	537695	PPS KENDARI	43,633,886,000	43,633,886,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	537611	PPS NIZAM ZACHMAN	29,534,068,000	29,534,068,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,724,781,854,000	5,724,781,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN TOTAL			
02		INSPEKTORAT JENDERAL	15,127,743,000	15,127,914,000			
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	15,127,743,000	15,127,914,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan

 (06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN TOTAL			
06		DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	158,069,244,000	158,066,570,000			
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,347,589,000	7,347,589,000	0	100.0000%	Sudah Sesuai
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	150,721,655,000	150,718,981,000	2,674,000	100.0018%	Lebih Terumumkan

 (07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN TOTAL			
07		DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	1,170,166,198,000	1,169,007,198,000			
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,455,753,000	6,455,753,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,199,403,000	3,199,403,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000	2,736,010,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	477456	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	2,970,613,000	2,970,613,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,154,804,419,000	1,153,645,419,000	1,159,000,000	100.10%	Lebih Terumumkan

 (04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		897,634,697,000	917,960,850,000			
1	239192	BBPB AIR PAYAU JEPARA	33,776,312,000	33,776,312,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	238734	BBPB AIR TAWAR SUKABUMI	26,301,351,000	26,301,351,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427706	BBPB LAUT LAMPUNG	17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	445393	BLU PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	126,396,102,000	126,396,102,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	567800	BPKIL SERANG	3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	567350	BPB AIR PAYAU SITUBONDO	48,941,145,000	48,941,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	567680	BPB AIR PAYAU TAKALAR	15,771,406,000	15,771,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	567385	BPB AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567584	BPB AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	237657	BPB AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	538911	BPB AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	567720	BPB LAUT AMBON	14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	567474	BPB LAUT BATAM	9,292,277,000	9,292,277,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	567762	BPB LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	445394	BPI UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,854,000	6,052,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	524,099,649,000	544,425,802,000	(20,326,153,000)	96.27%	Kurang Terumumkan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Strategis	:	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu
Nama IKU SK.03.8	:	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP STASIUN PPMHKP PALU (IKU)

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	3.50								3,50
Realisasi	4.00							4.00	
%Capaian	114,29%							114,29%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu dilakukan secara online dan offline, petugas yang telah ditunjuk menginstruksikan kepada responden untuk berpartisipasi dalam mengisi link SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) yang telah disiapkan oleh PUSDATIN Kementerian Kelautan Perikanan, adapun link yang dimaksud adalah <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/43> Komunikasi pemberitahuan link dilakukan melalui via whatsapp, telpon serta tatap muka secara langsung

Lokasi pengumpulan data dilakukan di kantor pelayanan SKIPM Palu, Tempat Pemeriksaan Fisik (TPF) dan Laboratorium SKIPM Palu serta kediaman responden. Pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan

Waktu pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan mulai tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Mengolah hasil survei;
6. Menyajikan dan melaporkan hasil

Hasil pengolahan data terhadap Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Palu pada Triwulan I (1 Januari s/d 31 Maret 2026), dari setiap unsur pelayanan telah mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi yaitu 4.00. Hal ini menjadi indikator bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Palu telah berjalan dengan baik, Perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus mempertahankan pelayanan yang sudah baik tersebut.

Adapun cara pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

$$\text{IKM} = 36,00 \times \frac{1}{9}$$

$$\text{IKM} = 4,00$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**

$$\text{SKM} = \text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM} = 4,00 \times 25$$

$$\text{SKM} = 100$$

Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026 UPT Stasiun PPMHKP Palu.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026 10 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan OP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP).

Target Indeks SKM yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2026 adalah 3,5 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian dari hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 1273/SJ.8/TU.140/IV/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

- Indeks SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah **3,85** dan mutu pelayanan diperoleh "A" kategori "**Sangat Baik**". Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) responden yang melakukan survei.
- Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM dengan kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) OP dan kategori baik sebanyak 1 (satu) OP. OP dengan nilai SKM tertinggi diraih oleh Stasiun PPMHKP Gorontalo, Stasiun PPMHKP Palu, dan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan .

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	OP	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	55	Online
2	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	28	Online

Akar Masalah	Penanggung Jawab
Masih adanya pengguna jasa yang lupa untuk mengisi survey dengan aplikasi SISUSAN sebagai saran untuk penilaian terhadap pelayanan yang diberikan. Ditambah lagi petugas layanan tidak mengingatkan untuk melakukan pengisian.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Tindakan yang dilaksanakan	Penanggung Jawab
Memberikan sosialisasi saat kegiatan surveilan dan inspeksi serta melalui media sosial (WA)	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Pada TW I 2026 secara setiap bulannya dilakukan monitoring aplikasi SUSAN KKP. Dan untuk selalu meningkatkan nilai unsur-unsur pelayanan yang menjadi fokus penilaian	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Pada TW I 2026 telah dilakukan monitoring temuan pada aplikasi SUSAN KKP dengan hasil adanya peningkatan nilai SKM dibandingkan dengan nilai SKM TW IV 2025 sdh ditindaklanjuti	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Palu, 15 April 2026

Kepala



Hamzah, S,Pi, M.Si

DOKUMENTASI KEGIATAN TW I 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI SKIPM PALU

Susan KKP

Stasiun KIPM Palu

Dashboard

Mapping Data

Laporan

- Data Detail
- Rekap per UPP per Unsur
- Rekap SKM per Produk Layanan
- Rekap SKM per UPP
- Rekap SKM per Eselon
- Upload Laporan Movev
- Resume Laporan Movev

PAGES

Download

Profile

Data IKM

Kepmen 20/ Triwulan 1 2026

Submit

50 Data terakhir Tw 1/2026, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bmutu	Stasiun PPMH KP Bau-Bau	2026	1	5.00	95.05	23
bmutu	Stasiun PPMH KP Bengkulu	2026	1	4.95	98.61	20
bmutu	Stasiun PPMH KP Aceh	2026	1	5.00	98.15	3
bmutu	Stasiun PPMH KP Medan II	2026	1	4.92	94.93	52
bmutu	Stasiun PPMH KP Palu	2026	1	5.00	100.00	28
bmutu	Stasiun PPMH KP Bima	2026	1	4.88	98.26	8
bmutu	Stasiun PPMH KP Bandung	2026	1	4.89	95.61	19

Susan KKP

Stasiun KIPM Palu

Dashboard

Mapping Data

Laporan

- Data Detail
- Rekap per UPP per Unsur
- Rekap SKM per Produk Layanan
- Rekap SKM per UPP
- Rekap SKM per Eselon
- Upload Laporan Movev
- Resume Laporan Movev

PAGES

Download

Profile

Logout

Laporan SKM Resume

Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP per Layanan

Data IKM

Kepmen 20/2025 Triwulan 1 2026

Submit

Data Rekap per UPP per Layanan Tw 1/2026

Download Data

10 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Nama Layanan	Jml Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	SKM
bmutu	Stasiun PPMH KP Palu	2026	1	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00
bmutu	Stasiun PPMH KP Palu	2026	1	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	27	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00

Showing 1 to 2 of 2 entries

Download Data

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Stasiun KIPM Palu

Data Layanan

Pilih Layanan

- ☐ Laporan hasil uji mutu produk perikanan
- ☐ Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
- ☐ Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)
- ☐ Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- ☐ Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)
- ☐ Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
- ☐ Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- ☐ Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- ☐ Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
- ☐ Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Data Responden

Waktu Survey

15-Oct-2025 15:25

Nama

Jenis Usaha

- ☐ Perseorangan
- ☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

- ☐ Pria/Laki-laki
- ☐ Wanita/Perempuan

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Link SKM

<https://drive.google.com/drive/folders/1epIP5EBgaolCYosvE7rp2ZewJAiyTJMx?usp=sharing>



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	: 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026	10 April 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026	

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan OP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP).

Target Indeks SKM yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2026 adalah 3,5 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian dari hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 1273/SJ.8/TU.140/IV/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

1. Indeks SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah **3,85** dan mutu pelayanan diperoleh “**A**” kategori “**Sangat Baik**”. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM dengan kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) OP dan kategori baik sebanyak 1 (satu) OP. OP dengan nilai SKM tertinggi diraih oleh Stasiun PPMHKP Gorontalo, Stasiun PPMHKP Palu, dan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan .

3. Hasil SKM berdasarkan rekap per produk layanan dari 13 (tiga belas) produk layanan terdapat 9 (sembilan) layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 (satu) produk layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB). Kemudian, terdapat 3 (tiga) produk layanan yang tidak memiliki responden yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPOIB), Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), dan Sertifikat keikutsertaan dan *final report*.
4. Rekapitulasi per unsur layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur Layanan	Indeks	Nilai SKM
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3,88	97,01
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,86	96,56
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,85	96,15
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	3,86	96,55
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,86	96,49
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3,79	94,74
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3,81	95,13
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,87	96,78
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	3,85	96,31

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana) dan U3 (Waktu Penyelesaian Pelayanan).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala OP untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh OP masing-masing.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026

Tanggal : 10 April 2026

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP)
lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	OP	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	55	Online
2	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	28	Online
3	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	A	Sangat Baik	11	Online
4	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	3,98	4,00	3,98	3,99	99,81	A	Sangat Baik	43	Online
5	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,97	3,99	3,99	3,99	3,99	99,77	A	Sangat Baik	157	Online
6	Stasiun PPMHKP Ternate	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	99,54	A	Sangat Baik	54	Online
7	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,99	3,98	3,99	3,97	3,98	3,96	3,98	3,97	3,98	3,98	99,46	A	Sangat Baik	225	Online
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,94	3,97	3,92	3,94	4,00	3,97	3,94	4,00	3,97	99,15	A	Sangat Baik	36	Online
9	Stasiun PPMHKP Sorong	3,98	4,00	3,98	3,95	3,98	3,95	3,93	3,95	3,95	3,96	99,07	A	Sangat Baik	42	Online
10	Balai PPMHKP Mataram	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,95	98,82	A	Sangat Baik	26	Online
11	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,80	4,00	4,00	3,95	4,00	3,90	3,90	4,00	3,95	3,94	98,61	A	Sangat Baik	20	Online
12	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	3,88	3,88	3,75	4,00	4,00	4,00	3,88	4,00	3,93	98,26	A	Sangat Baik	8	Online
13	Stasiun PPMHKP Aceh	3,67	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,93	98,15	A	Sangat Baik	3	Online
14	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,91	3,70	3,87	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	3,91	3,92	98,07	A	Sangat Baik	23	Online
15	Balai PPMHKP Makassar	3,93	3,92	3,92	3,90	3,93	3,90	3,91	3,92	3,92	3,92	97,96	A	Sangat Baik	368	Online
16	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	4,00	3,88	3,92	97,92	A	Sangat Baik	8	Online
17	Balai PPMHKP Balikpapan	3,89	3,88	3,95	3,86	3,91	3,82	3,84	4,00	4,00	3,91	97,66	A	Sangat Baik	57	Online
18	Balai PPMHKP Denpasar	3,92	3,91	3,87	3,90	3,91	3,88	3,90	3,92	3,92	3,90	97,61	A	Sangat Baik	151	Online
19	Stasiun PPMHKP Pontianak	3,96	3,96	3,96	3,98	3,98	3,79	3,77	3,79	3,79	3,89	97,22	A	Sangat Baik	53	Online
20	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	3,93	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,93	3,93	3,93	3,89	97,22	A	Sangat Baik	14	Online
21	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,94	3,92	3,92	3,91	3,87	3,85	3,84	3,89	3,86	3,89	97,20	A	Sangat Baik	118	Online
22	Stasiun PPMHKP Merauke	3,91	3,91	3,82	3,82	3,86	3,91	3,82	3,86	3,82	3,86	96,46	A	Sangat Baik	22	Online

23	Balai PPMHKP Ambon	3,88	3,86	3,84	3,79	3,83	3,90	3,86	3,90	3,86	3,86	96,46	A	Sangat Baik	58	Online
24	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	3,88	3,85	3,62	3,90	3,86	3,85	3,85	3,91	3,87	3,84	96,05	A	Sangat Baik	138	Online
25	Stasiun PPMHKP Bandung	3,84	3,79	3,84	3,79	3,84	3,84	3,84	3,79	3,84	3,82	95,61	A	Sangat Baik	19	Online
26	Balai PPMHKP Jakarta	3,86	3,84	3,81	3,88	3,84	3,75	3,79	3,77	3,79	3,81	95,37	A	Sangat Baik	57	Online
27	Balai PPMHKP Tarakan	3,82	3,79	3,85	3,85	3,80	3,77	3,79	3,80	3,77	3,81	95,13	A	Sangat Baik	61	Online
28	Balai PPMHKP Medan I	3,84	3,81	3,84	3,84	3,81	3,81	3,84	3,81	3,63	3,80	95,09	A	Sangat Baik	43	Online
29	Balai PPMHKP Entikong	3,86	3,81	3,81	3,71	3,81	3,78	3,83	3,79	3,83	3,80	95,06	A	Sangat Baik	72	Online
30	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	3,74	3,83	3,83	3,78	3,87	3,78	3,83	3,78	3,78	3,80	95,05	A	Sangat Baik	23	Online
31	Stasiun PPMHKP Medan II	3,87	3,81	3,75	3,85	3,79	3,71	3,75	3,88	3,77	3,80	94,93	A	Sangat Baik	52	Online
32	Balai PPMHKP Jayapura	3,60	4,00	3,80	3,80	4,00	3,60	3,80	3,80	3,60	3,78	94,44	A	Sangat Baik	5	Online
33	Balai PPMHKP Manado	3,73	3,77	3,77	3,77	3,73	3,73	3,77	3,77	3,82	3,76	94,07	A	Sangat Baik	22	Online
34	Balai PPMHKP Surabaya II	3,96	3,95	3,95	3,96	3,92	3,01	3,03	3,93	3,94	3,74	93,51	A	Sangat Baik	104	Online
35	Stasiun PPMHKP Palembang	3,83	3,76	3,72	3,76	3,76	3,55	3,72	3,86	3,69	3,74	93,49	A	Sangat Baik	29	Online
36	Stasiun PPMHKP Kupang	3,74	3,75	3,74	3,71	3,73	3,71	3,71	3,75	3,73	3,73	93,21	A	Sangat Baik	139	Online
37	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,62	3,81	3,76	3,71	3,67	3,81	3,71	3,71	3,62	3,71	92,86	A	Sangat Baik	21	Online
38	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,77	3,69	3,69	3,69	3,69	3,77	3,62	3,77	3,69	3,71	92,74	A	Sangat Baik	13	Online
39	Stasiun PPMHKP Kendari	3,81	3,75	3,69	3,66	3,78	3,53	3,72	3,69	3,72	3,70	92,62	A	Sangat Baik	32	Online
40	Stasiun PPMHKP Batam	3,69	3,66	3,69	3,86	3,66	3,55	3,59	3,72	3,62	3,67	91,76	A	Sangat Baik	29	Online
41	Balai PPMHKP Semarang	3,67	3,62	3,65	3,67	3,64	3,53	3,58	3,71	3,68	3,64	91,06	A	Sangat Baik	101	Online
42	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3,67	3,63	3,62	3,69	3,63	3,53	3,59	3,65	3,63	3,63	90,71	A	Sangat Baik	133	Online
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,67	3,67	3,53	3,67	3,47	3,60	3,60	3,67	3,60	3,61	90,19	A	Sangat Baik	15	Online
44	Pusat Manajemen Mutu	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik	20	Online
45	Balai PPMHKP Lampung	3,73	3,65	3,57	3,59	3,54	3,43	3,43	3,68	3,51	3,57	89,26	A	Sangat Baik	37	Online
46	Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta	3,68	3,59	3,38	3,59	3,54	3,41	3,51	3,59	3,54	3,54	88,44	A	Sangat Baik	37	Online
47	Stasiun PPMHKP Tahuna	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,11	77,78	B	Baik	1	Online

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	1952	3,92	3,91	3,89	3,92	3,90	3,84	3,86	3,91	3,90	3,90	97,38	A	Sangat Baik
2	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	69	3,86	3,83	3,80	3,81	3,87	3,83	3,87	3,93	3,84	3,85	96,18	A	Sangat Baik
3	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	200	3,84	3,82	3,80	3,76	3,81	3,75	3,75	3,83	3,79	3,79	94,75	A	Sangat Baik
4	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	345	3,80	3,77	3,74	3,72	3,74	3,63	3,66	3,77	3,74	3,73	93,24	A	Sangat Baik
5	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	42	3,76	3,76	3,86	3,79	3,79	3,69	3,57	3,81	3,69	3,71	93,65	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	120	3,71	3,68	3,61	3,72	3,73	3,58	3,63	3,68	3,68	3,67	91,69	A	Sangat Baik
7	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	24	3,79	3,71	3,67	3,67	3,58	3,46	3,63	3,67	3,67	3,65	91,20	A	Sangat Baik
8	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>)	20	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik
9	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	4	3,75	3,75	3,50	3,50	3,50	3,25	3,75	3,50	3,50	3,56	88,89	A	Sangat Baik
10	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	7	3,57	3,29	3,29	3,29	3,29	3,14	3,14	3,43	3,14	3,29	82,14	B	Baik
11	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seluruh Layanan BPPMHKP		2783	97,01	96,56	96,15	96,55	96,49	94,74	95,13	96,78	96,31	3,85	96,19	A	Sangat Baik